

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 28 TAHUN 2018, NOMOR 2 TAHUN 2019,
DAN NOMOR 16 TAHUN 2019**

PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 28 TAHUN 2018	PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2019	PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA SOLOK	TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA SOLOK TAHUN 2019	TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA SOLOK TAHUN 2019
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SOLOK, Menimbang :</p> <p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Ayat 2) huruf e dan Pasal 93 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu menetapkan Standar Biaya Umum dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Pemerintah Kota Solok untuk Tahun Anggaran 2019;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Solok Tahun 2019.</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SOLOK, Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam rangka pengoptimalan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 maka perlu penyesuaian terhadap Standar Biaya Umum dilingkungan Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2019;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2019;</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SOLOK, Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam rangka pengoptimalan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 maka perlu penyesuaian terhadap Standar Biaya Umum dilingkungan Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2019</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2019;</p>

<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43400); 5. Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43400); 5. Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah
---	--	--

<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43400);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017</p>	<p>diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solak dan Kotamadya Payakumbuh;</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019</p> <p>9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/ PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;</p>	<p>diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solak dan Kotamadya Payakumbuh;</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019</p> <p>9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/ PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;</p>
---	--	--

<p>Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019;</p> <p>13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/ PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;</p>		
<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA SOLOK TAHUN 2019</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAVA UMUM PEMERINTAH KOTA SOLOK TAHUN 2019.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAVA UMUM PEMERINTAH KOTA SOLOK TAHUN 2019.</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 1</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok selanjutnya diingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
8. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah Pegawai di

<p>lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat berdasarkan Persetujuan Walikota dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang terdiri dari Pegawai Tidak Tetap (PTT), Pegawai Kontrak, Pegawai Kontrak Sukarela, Guru Tidak Tetap, Penjaga Kantor, Satpam, Petugas Kebersihan Kantor dan lainnya.</p> <p>9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.</p> <p>10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.</p> <p>11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.</p> <p>12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pernegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.</p> <p>13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah</p>		
---	--	--

<p>pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.</p> <p>14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.</p> <p>15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK- SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.</p> <p>16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.</p> <p>17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.</p> <p>18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyirnpkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.</p>		
--	--	--

<p>19. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.</p> <p>20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisikan rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyesuaian APBD.</p> <p>22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.</p> <p>23. Standar Biaya adalah Satuan Biaya yang merupakan batas tertinggi yang ditetapkan</p>		
---	--	--

<p>sebagai biaya/ indeks satuan biaya yang digunakan oleh Perangkat Daerah.</p> <p>24. Narasumber adalah seseorang yang terkait dengan rangkaian kegiatan mengenai sesuatu hal untuk diminta keterangan, pendapat ataupun penjelasan.</p> <p>25. Instruktur adalah seseorang yang berfungsi memberikan pelatihan, pembinaan dan pengarahan terhadap peserta.</p> <p>26. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dari lokasi kantor/ Perangkat Daerah untuk kepentingan kedinasan.</p> <p>27. Lumpsum adalah yang dibayarkan sekaligus.</p> <p>28. Biaya riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.</p> <p>29. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok untuk melaksanakan tugas Kedinasan.</p> <p>30. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS untuk melaksanakan tugas kedinasan.</p>		
---	--	--

<p>31. Pejabat Pengadaan adalah personal yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.</p> <p>32. Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut Pejabat PHP/ PPH P adalah pejabat/ panitia yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang bertugas menilai, memeriksa dan menerima hasil pekerjaan termasuk pekerjaan swakelola.</p> <p>33. Tenaga ahli Fraksi DPRD adalah tenaga yang diangkat untuk membantu melaksanakan tugas dan wewenang Fraksi di DPRD.</p> <p>34. Bimbingan Teknis, yang selanjutnya disebut Birntek adalah kegiatan untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas teknis.</p> <p>35. Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS dengan kurikulum berbasis kompetensi.</p>		
<p>BAB II STANDAR UMUM</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 2</p> <p>(1) Standar Biaya Umum merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan biaya tertinggi dan perkiraan dalam penyusunan anggaran yang dalam penerapannya tetap memperhatikan prinsip efisien anggaran serta Kemampuan Keuangan Daerah.</p>		
<p>Pasal 3</p> <p>Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Solok Nomor 28 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2018 Nomor 28) diubah sehingga menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Solok Nomor 28 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2018 Nomor 28) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p>
<p>Pasal 4</p> <p>Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan sebagai pedoman dalam menyusun besaran biaya kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2019.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>BAB III KETENTUAN PENUTUP</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 5</p> <p>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.		
Ditetapkan di Solok Pada tanggal 03 September 2018 WALIKOTA SOLOK Ttd ZUL ELFIAN	Ditetapkan di Solok Pada tanggal 10 Januari 2019 WALIKOTA SOLOK Ttd ZUL ELFIAN	Ditetapkan di Solok Pada tanggal 28 Juni 2019 WALIKOTA SOLOK Ttd ZUL ELFIAN
Diundangkan di Solok Pada tanggal 03 September 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK Ttd RUSDIANTO	Diundangkan di Solok Pada tanggal 10 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK Ttd Rusdianto	Diundangkan di Solok Pada tanggal 28 Juni 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK Ttd Rusdianto